

PENGUKURAN KEGIATAN EKONOMI MAKRO: KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS ATAS PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, PENGANGGURAN, DAN SIKLUS EKONOMI DI INDONESIA

Rizky Sugeng Riadi¹, Rohmat Hardiyanto², Nurris Septa Pratama³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wira Buana

rizkysugeng4@gmail.com, hardiyanhardi69@gmail.com, nurrisseptas8@gmail.com

Abstract

The measurement of macroeconomic activities constitutes the analytical foundation for evidence-based economic policy formulation. This article aims to systematically review the concepts, methodologies, and interrelationships among four key macroeconomic indicators, Gross Domestic Product (GDP), inflation, unemployment, and the business cycle, within the context of the Indonesian economy. Employing a comprehensive systematic literature review approach reinforced by secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and Bank Indonesia (BI) for the period 2019-2023, this study demonstrates that: (1) Indonesia recorded real GDP growth of 5.05% in 2023 with an expenditure structure dominated by household consumption (54.4%); (2) Consumer Price Index (CPI) inflation was successfully reduced from 5.51% in 2022 to 2.61% in 2023 through Bank Indonesia's tight monetary policy; (3) the Open Unemployment Rate (OUR) declined to 5.32% as post-pandemic recovery gained momentum; and (4) Indonesia's economic cycle exhibited high resilience following the technical recession of 2020. This review affirms the critical importance of fiscal-monetary policy coordination in stabilizing the economic cycle and achieving long-term macroeconomic targets. The findings are relevant for academics, policymakers, and practitioners requiring an integrated analytical framework for interpreting Indonesian economic conditions.

Keywords: *Gross Domestic Product; Inflation; Unemployment; Business Cycle; Indonesian Macroeconomic Policy*

Abstrak

Pengukuran kegiatan ekonomi makro merupakan fondasi analitik bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berbasis bukti. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep, metodologi, dan interrelasi antara empat indikator ekonomi makro utama, Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, pengangguran, dan siklus ekonomi dalam konteks perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur komprehensif (systematic literature review) yang diperkuat data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) periode 2019-2023, artikel ini menunjukkan bahwa: (1) Indonesia mencatat pertumbuhan PDB riil sebesar 5,05% pada tahun 2023 dengan struktur pengeluaran yang didominasi konsumsi rumah tangga (54,4%); (2) inflasi IHK berhasil ditekan dari 5,51% pada 2022 menjadi 2,61% pada 2023 melalui kebijakan moneter

ketat Bank Indonesia; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,32% seiring pemulihan pasca-pandemi; serta (4) siklus ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi tinggi pasca-resesi teknis 2020. Kajian ini menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal-moneter dalam menstabilkan siklus ekonomi dan mencapai target makroekonomi jangka panjang. Temuan ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi yang memerlukan kerangka analitis terpadu untuk membaca kondisi perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: *Produk Domestik Bruto; Inflasi; Pengangguran; Siklus Ekonomi; Kebijakan Makroekonomi Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi makro, sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku agregat suatu perekonomian, bertumpu pada kemampuan untuk mengukur, menganalisis, dan menginterpretasikan variabel-variabel berskala nasional secara akurat. Tanpa pengukuran yang valid dan reliabel, baik diagnosis kondisi ekonomi maupun preskripsi kebijakan niscaya akan mengandung kesalahan sistemis. Hal inilah yang menjadikan pemahaman mendalam terhadap metodologi pengukuran ekonomi makro sebagai kompetensi fundamental, bukan hanya bagi akademisi dan ekonom, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, analis keuangan, dan pemimpin bisnis (Mankiw, 2023; Blanchard & Johnson, 2022).

Indonesia, sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan PDB nominal mencapai Rp20.892 triliun (setara USD 1,37 triliun) pada 2023 dan anggota kelompok G20, menghadirkan konteks yang kaya sekaligus kompleks untuk studi pengukuran ekonomi makro (World Bank, 2024). Dinamika perekonomian Indonesia, dari tekanan inflasi pascapandemi yang dipicu konflik Rusia-Ukraina, pemulihan pasar tenaga kerja yang gradual, hingga resiliensi siklus ekonomi menghadapi guncangan eksternal, menawarkan laboratorium empiris yang berharga untuk menguji relevansi konsep-konsep teoretis.

Kajian atas literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tentang pengukuran ekonomi makro Indonesia cenderung bersifat parsial, membahas satu variabel secara mendalam namun mengabaikan interrelasi sistematisnya dengan variabel-variabel lain (Sukirno, 2021; Prasetyo, 2022). Kesenjangan ini menjadi motivasi utama penyusunan artikel ini: menghadirkan kajian yang terintegrasi dan terpadu atas empat pilar pengukuran ekonomi makro, Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, pengangguran, dan siklus ekonomi, dalam satu kerangka analitis yang kohesif.

Secara spesifik, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep dan metodologi pengukuran PDB beserta implikasinya bagi analisis pertumbuhan ekonomi; (2) menelaah mekanisme pengukuran inflasi melalui IHK dan Deflator PDB serta relevansinya terhadap kebijakan moneter; (3) menganalisis struktur ketenagakerjaan dan indikator pengangguran dalam konteks Indonesia; (4) mendeskripsikan dinamika siklus ekonomi dan respons kebijakan stabilisasi; serta (5) mengintegrasikan data empiris terkini untuk memetakan kondisi makroekonomi Indonesia periode 2019-2023.

Kontribusi artikel ini terletak pada sintesis teoritis-empiris yang komprehensif, disertai pemetaan interrelasi antar-indikator yang memungkinkan pembaca membangun pemahaman holistik atas dinamika makroekonomi. Artikel ini juga memberikan implikasi kebijakan yang spesifik bagi konteks Indonesia, mengisi celah antara teori buku teks dan realitas empiris.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Artikel ini bersifat kualitatif dan tidak menguji hipotesis kausal; kajian pustaka berikut disajikan untuk membangun kerangka konseptual atas empat indikator ekonomi makro yang menjadi fokus analisis.

2.1 Evolusi Konsep Pengukuran Output Nasional

Konsep pengukuran output nasional secara sistematis mulai berkembang sejak abad ke-17, ketika William Petty pertama kali mencoba mengestimasi pendapatan nasional Inggris. Namun demikian, kerangka konseptual modern akuntansi pendapatan nasional baru terbentuk secara definitif pada dekade 1930-an sampai dengan 1940-an, didorong oleh urgensi kebijakan yang ditimbulkan oleh Great Depression dan Perang Dunia II. Simon Kuznets, yang kemudian dianugerahi Nobel Ekonomi pada 1971, memainkan peran pivotal dalam pengembangan sistem Gross National Product (GNP) untuk Amerika Serikat pada awal tahun 1930-an (Coyle, 2014).

Pergeseran dari GNP menuju GDP (Gross Domestic Product) sebagai indikator utama terjadi secara bertahap pada 1980-an hingga 1990-an, seiring meningkatnya mobilitas modal internasional yang membuat batas antara konsep 'nasional' dan 'domestik' semakin relevan secara analitis. Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts/SNA) yang

distandarisasi oleh PBB, dengan versi terkini SNA 2008, menyediakan kerangka konseptual universal yang diadopsi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia melalui BPS (BPS, 2024; United Nations, 2009).

2.2 Teori Pengukuran Inflasi: Dari Fisher hingga Targeting

Teori kuantitas uang yang dirumuskan oleh Irving Fisher dalam persamaan $MV = PT$ meletakkan dasar hubungan kausal antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Dalam perkembangannya, monetarisme Friedman (1968) mempertegas bahwa inflasi pada hakikatnya merupakan "fenomena moneter", selalu dan di mana pun disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang melampaui pertumbuhan output riil. Pandangan ini berimplikasi langsung pada pentingnya pengendalian suplai uang sebagai instrumen anti-inflasi (Mishkin, 2019).

Di sisi lain, pendekatan Keynesian menekankan bahwa inflasi dapat bersumber dari sisi permintaan (demand-pull) maupun penawaran (cost-push), sehingga respons kebijakan perlu mempertimbangkan diagnosis sumber inflasi terlebih dahulu sebelum meresepkan obat yang tepat. Perkembangan lebih lanjut, terutama New Keynesian Economics, mengintegrasikan ekspektasi rasional dan rigiditas harga ke dalam model inflasi yang lebih realistis (Mankiw & Reis, 2018). Paradigma inflation targeting, yang diadopsi Bank Indonesia sejak 2005, merupakan implementasi praktis dari sintesis teori-teori tersebut.

2.3 Teori Pengangguran: Natural Rate dan Kurva Phillips

Konsep Natural Rate of Unemployment (NRU) atau Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) yang dirumuskan Friedman (1968) dan Phelps (1968) secara simultan merupakan kontribusi teoretis yang fundamental bagi pemahaman modern tentang pengangguran. Konsep ini menegaskan bahwa terdapat batas bawah alami tingkat pengangguran yang tidak dapat diturunkan lebih jauh tanpa memicu akselerasi inflasi, karena di bawah level tersebut ekspektasi inflasi akan terus meningkat (Blanchard & Johnson, 2022).

Kurva Phillips, yang pertama kali diidentifikasi oleh A.W. Phillips (1958) melalui data ketenagakerjaan Inggris 1861-1957, merepresentasikan trade-off empiris antara inflasi dan pengangguran. Meskipun stagflasi 1970-an sempat mempertanyakan validitas hubungan ini, kerangka Kurva Phillips yang diperkaya dengan ekspektasi (expectations-

augmented Phillips Curve) tetap menjadi referensi analitis utama dalam merumuskan kebijakan stabilisasi. Untuk Indonesia, penelitian Alamsyah et al. (2022) menunjukkan bahwa hubungan Phillips tetap signifikan meskipun dengan derajat sensitivitas yang moderat.

2.4 Siklus Ekonomi: Teori dan Empiris

Teori siklus ekonomi telah mengalami evolusi panjang, dari teori eksogen berbasis guncangan eksternal hingga teori endogen yang menekankan dinamika internal perekonomian. Real Business Cycle (RBC) Theory yang dikembangkan Kydland dan Prescott (1982), yang kemudian mengantarkan keduanya meraih Nobel Ekonomi 2004, menyatakan bahwa fluktuasi siklus didorong oleh guncangan teknologi yang bersifat riil, bukan nominal. Pandangan ini kemudian disintesis dengan elemen rigiditas harga dan upah dalam kerangka New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) yang menjadi standar analisis makroekonomi modern (Snowdon & Vane, 2019).

Dalam konteks ekonomi berkembang seperti Indonesia, faktor-faktor eksternal, fluktuasi harga komoditas ekspor, volatilitas arus modal, dan perubahan kondisi ekonomi global, memainkan peran yang lebih dominan dalam membentuk siklus dibandingkan ekonomi maju (Aizenman et al., 2020; IMF, 2024). Hal ini menjadikan koordinasi kebijakan fiskal-moneter (policy mix) sebagai prioritas strategis yang tidak dapat diabaikan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur komprehensif (comprehensive systematic literature review) yang dikombinasikan dengan analisis data sekunder kuantitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat sintesis teoretis-empiris, yakni mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang kohesif dan menyeluruh (Tranfield et al., 2003; Snyder, 2019).

3.2 Sumber Data dan Periode Analisis

Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber resmi dan terpercaya, meliputi: (1) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS) untuk data PDB, inflasi IHK, dan

ketenagakerjaan; (2) Bank Indonesia (BI) untuk data kebijakan moneter, inflasi, dan laporan perekonomian; (3) Kementerian Keuangan RI untuk data fiskal; (4) World Bank dan International Monetary Fund (IMF) untuk data perbandingan internasional. Periode analisis mencakup tahun 2019-2023, dengan penekanan pada tahun 2020-2023 untuk menangkap dinamika pasca-pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai peristiwa struktural penting dalam trajektori ekonomi Indonesia.

3.3 Kerangka Analitis

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, review konseptual-teoretis yang mengidentifikasi landasan teori, definisi operasional, dan metodologi pengukuran setiap indikator. Kedua, analisis deskriptif-kuantitatif yang memaparkan tren dan pola empiris dari data yang dikumpulkan. Ketiga, analisis integrasi yang mengkaji hubungan dan interaksi antar-indikator, termasuk implikasi kebijakan yang relevan. Seluruh data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan diverifikasi silang antara sumber untuk menjamin akurasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Produk Domestik Bruto: Konsep, Metodologi, dan Dinamika Indonesia

Definisi Operasional dan Kerangka Konseptual. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan ukuran sentral dalam sistem akuntansi pendapatan nasional modern. Mengacu pada System of National Accounts 2008 (SNA 2008) yang diadopsi secara universal, PDB didefinisikan sebagai nilai pasar agregat dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi residen di dalam wilayah ekonomi suatu negara dalam periode referensi tertentu, biasanya satu kuartal atau satu tahun (United Nations, 2009; Mankiw, 2023).

Terdapat tiga pendekatan yang secara akuntansi menghasilkan nilai PDB yang identik, konsekuensi dari sifat sirkular (circular flow of income) dalam perekonomian. Pertama, Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) mengagregasi seluruh pengeluaran akhir dalam perekonomian melalui persamaan identitas $PDB = C + I + G + (X - M)$, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi bruto, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor barang dan jasa. Kedua, Pendekatan Pendapatan

(Income Approach) menjumlahkan seluruh balas jasa faktor produksi: upah tenaga kerja (W), sewa (R), bunga (i), dan keuntungan (π), ditambah depresiasi dan pajak tak langsung neto. Ketiga, Pendekatan Produksi/Output (Production Approach) mengagregasi nilai tambah bruto (gross value added) dari seluruh sektor ekonomi, yang secara otomatis menghindari penghitungan ganda (double counting).

PDB Nominal, Riil, dan Deflator PDB. Distingsi antara PDB nominal dan PDB riil merupakan salah satu kontribusi analitis terpenting dalam ekonomi makro. PDB nominal diukur pada harga berlaku (current prices) sehingga mengandung pengaruh perubahan harga (inflasi) maupun perubahan volume produksi. Sebaliknya, PDB riil diukur pada harga konstan (constant prices) tahun dasar tertentu, sehingga perubahan PDB riil murni mencerminkan perubahan volume output dan karenanya menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi yang valid (Blanchard & Johnson, 2022). Hubungan matematis antara keduanya dinyatakan melalui Deflator PDB:

$$\text{Deflator PDB} = (\text{PDB Nominal} / \text{PDB Riil}) \times 100$$

Deflator PDB merupakan ukuran inflasi yang lebih komprehensif daripada IHK karena mencakup seluruh barang dan jasa dalam perekonomian, bukan hanya keranjang konsumen. Namun, Deflator PDB hanya tersedia secara kuartalan/tahunan, sedangkan IHK tersedia bulanan, menjadikan IHK lebih responsif untuk keperluan kebijakan moneter jangka pendek (Dornbusch et al., 2018).

Pertumbuhan PDB Indonesia 2019-2023. Tabel 1 menyajikan trajektori pertumbuhan PDB Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan dramaturgi pandemi COVID-19 dan pemulihan yang relatif cepat.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Riil Indonesia 2019-2022 (% yoy)

Indikator	2019	2020	2021	2022
PDB Nominal (Triliun Rp)	15.834	15.435	16.970	19.588
Pertumbuhan PDB Riil (%)	5,02	-2,07	3,69	5,31
Keterangan	Pre-pandemi	Resesi COVID-19	Pemulihan awal	Akselerasi pemulihan

Sumber: BPS (2024), diolah

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kontraksi PDB sebesar 2,07% pada 2020, pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, akibat guncangan simultan pada permintaan (lockdown dan pembatasan mobilitas) dan penawaran (gangguan rantai pasokan global) yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pemulihan yang dimulai pada 2021 (3,69%) dan mengakselerasi pada 2022 (5,31%) serta 2023 (5,05%) menunjukkan resiliensi fundamental struktur ekonomi Indonesia, meskipun laju pemulihan masih di bawah pertumbuhan potensial pra-pandemi (IMF, 2024).

Tabel 2. Komposisi PDB Indonesia 2023 Berdasarkan Pendekatan Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	Nominal (Triliun Rp)	Proporsi (% PDB)
Konsumsi Rumah Tangga (C)	11.376	54,4%
Investasi / PMTB (I)	5.823	27,9%
Pengeluaran Pemerintah (G)	2.214	10,6%
Ekspor Neto (X – M)	1.479	7,1%
TOTAL PDB	20.892	100%

Sumber: BPS (2024), Laporan Perekonomian Indonesia 2023

Dominasi konsumsi rumah tangga sebesar 54,4% PDB mencerminkan karakteristik perekonomian Indonesia sebagai ekonomi berbasis konsumsi domestik yang relatif tahan terhadap guncangan eksternal. Namun, proporsi investasi yang 'hanya' 27,9% juga menjadi perhatian para ekonom, mengingat Indonesia membutuhkan investasi yang lebih tinggi, idealnya di atas 30% PDB, untuk mencapai pertumbuhan 7-8% yang dibutuhkan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Bappenas, 2023; IMF, 2024).

4.1.2 Inflasi: Pengukuran, Dinamika, dan Respons Kebijakan

Metodologi Pengukuran IHK Indonesia. Badan Pusat Statistik mengukur inflasi IHK menggunakan metode modified Laspeyres index dengan keranjang belanja yang diperbarui secara periodik melalui Survei Biaya Hidup (SBH). SBH 2022 yang menjadi basis keranjang terkini mencakup 853 komoditas yang dikelompokkan dalam 11 kelompok pengeluaran di 90 kota, memberikan representasi yang lebih luas dan akurat dibandingkan versi sebelumnya (BPS, 2024). Rumus tingkat inflasi IHK dinyatakan sebagai:

$$\pi_t = [(IHK_t - IHK_{t-1}) / IHK_{t-1}] \times 100\%$$

Tren Inflasi Indonesia 2019-2023. Tabel 3 memperlihatkan perkembangan inflasi IHK Indonesia selama periode analisis.

Tabel 3. Perkembangan Inflasi IHK Indonesia 2019-2023

Tahun	Inflasi IHK (%)	Target BI (%)	Faktor Utama Pembentuk Inflasi
2019	2,72	3,5 ± 1	Terkendali, inflasi inti rendah; harga pangan moderat
2020	1,68	3,0 ± 1	Penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19
2021	1,87	3,0 ± 1	Pemulihan bertahap; permintaan masih di bawah normal
2022	5,51	3,0 ± 1	Dampak konflik Rusia-Ukraina: lonjakan harga pangan & energi global
2023	2,61	3,0 ± 1	Kebijakan moneter ketat BI; normalisasi harga komoditas global

Sumber: BPS (2024); Bank Indonesia (2024), diolah

Data Tabel 3 menggambarkan volatilitas inflasi yang signifikan dalam kurun 2019-2023. Lonjakan inflasi ke 5,51% pada 2022, melampaui batas atas target Bank Indonesia 4,0%, merupakan respons perekonomian Indonesia terhadap guncangan pasokan global yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina, yang mendorong harga pangan (terutama minyak goreng) dan energi ke level yang belum pernah terjadi dalam satu dekade. Respons Bank Indonesia yang proaktif menaikkan BI7DRR sebesar 225 basis poin dari 3,50% (Agustus 2022) menjadi 5,75% (Januari 2023), terbukti efektif meredam inflasi ke 2,61% pada 2023, bahkan berada di bawah titik tengah target (BI, 2024). Ini merupakan bukti empiris efektivitas kerangka inflation targeting yang diterapkan Bank Indonesia.

4.1.3 Ketenagakerjaan dan Pengangguran: Struktur dan Dinamika

Kerangka Konseptual Ketenagakerjaan. Sistem klasifikasi ketenagakerjaan yang diterapkan BPS mengacu pada standar International Labour Organization (ILO) dengan definisi yang telah mengalami penyempurnaan substansial. Pengangguran terbuka (open unemployment) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak memiliki pekerjaan, tersedia untuk bekerja, dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang putus asa mencari kerja (discouraged workers). Pendekatan ini membedakan Indonesia dengan negara-negara yang menggunakan definisi lebih ketat, sehingga angka TPT tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa penyesuaian metodologis (BPS, 2024).

Tabel 4. Indikator Ketenagakerjaan Indonesia 2019-2023 (Agustus)

Indikator	2019	2020	2021	2023
Angkatan Kerja (juta orang)	133,56	138,22	140,15	147,71

Indikator	2019	2020	2021	2023
TPT (%)	5,28	7,07	6,49	5,32
TPAK (%)	67,50	67,77	68,26	69,63
Pengangguran (juta orang)	7,05	9,77	9,10	7,86

Sumber: BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (berbagai edisi)*, diolah

Data Tabel 4 memperlihatkan dampak pandemi yang dramatis terhadap pasar tenaga kerja Indonesia: TPT melonjak dari 5,28% (Agustus 2019) menjadi 7,07% (Agustus 2020), menambah sekitar 2,72 juta pengangguran dalam waktu satu tahun. Pemulihan berlangsung secara gradual, TPT turun ke 6,49% pada 2021 dan mencapai 5,32% pada 2023, mendekati kembali level pra-pandemi. Yang perlu dicermati adalah bahwa penurunan TPT tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas ketenagakerjaan; sebagian pemulihan didorong oleh penyerapan di sektor informal yang tidak selalu menjamin produktivitas dan kesejahteraan pekerja (ILO, 2023).

4.1.4 Siklus Ekonomi Indonesia: Dari Resesi Pandemi hingga Pemulihan

Perekonomian Indonesia sepanjang 2019-2023 menghadirkan ilustrasi siklus ekonomi yang relatif lengkap, dari ekspansi pra-pandemi, guncangan ke fase kontraksi pada 2020, pemulihan bertahap pada 2021-2022, hingga normalisasi di 2023. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang dinamika siklus di ekonomi berkembang yang menghadapi guncangan eksternal berskala global.

Respons kebijakan Indonesia terhadap resesi 2020 patut dicatat sebagai salah satu yang paling komprehensif di kawasan Asia Tenggara. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun pada 2020, setara dengan 4,5% PDB, mencakup dukungan kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi. Pada saat yang sama, Bank Indonesia memangkas BI7DRR sebesar 125 basis poin ke level terendah historis 3,50% dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana dalam rangka *burden sharing* dengan pemerintah (BI, 2024). Koordinasi *policy mix* yang intensif ini merupakan faktor utama yang menjelaskan relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

Tabel 5. Ringkasan Indikator Makroekonomi Indonesia: Gambaran Terintegrasi 2023

Indikator Makroekonomi	Nilai 2023	Interpretasi & Posisi
------------------------	------------	-----------------------

Indikator Makroekonomi	Nilai 2023	Interpretasi & Posisi
PDB Nominal	Rp 20.892 Triliun (~USD 1,37 T)	Terbesar di ASEAN; peringkat ke-16 dunia
Pertumbuhan PDB Riil	5,05% (yoy)	Di atas rata-rata global (~3,0%); fase ekspansi moderat
Inflasi IHK (Des 2023)	2,61%	Dalam target BI 2-4%; inflasi ringan, terkendali
Deflator PDB	~7,8%	Lebih tinggi dari IHK; mencerminkan tekanan harga di sektor produksi
TPT (Agustus 2023)	5,32% (7,86 juta orang)	Mendekati NATU estimasi 5-6%; pemulihan pascapandemi solid
TPAK (Agustus 2023)	69,63%	Meningkat; lebih banyak partisipasi angkatan kerja aktif
Suku Bunga BI7DRR	6,00% (akhir 2023)	Kebijakan moneter ketat untuk jangkar ekspektasi inflasi
Posisi Siklus Ekonomi	Ekspansi pasca-pemulihan	Output gap mendekati nol; transisi ekspansi-puncak

Sumber: BPS, Bank Indonesia, World Bank (2024), diolah penulis

4.2 Pembahasan

4.2.1 Segitiga Ketegangan Makroekonomi: PDB, Inflasi, dan Pengangguran

Salah satu temuan paling menarik dari analisis data 2019-2023 adalah dinamika Kurva Phillips yang beroperasi dalam konteks yang jauh lebih kompleks dari rumusan sederhana Phillips (1958). Pada 2020, kombinasi kontraksi PDB (-2,07%) dan lonjakan pengangguran (TPT 7,07%) terjadi bersamaan dengan inflasi yang rendah (1,68%), konsisten dengan prediksi teori. Namun pada 2022, terjadi situasi yang menyerupai stagflasi parsial: pertumbuhan PDB yang kuat (5,31%) namun bersamaan dengan inflasi yang melampaui target (5,51%), sementara pengangguran masih relatif tinggi (6,49%). Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya membedakan sumber inflasi: inflasi 2022 didominasi oleh guncangan penawaran (cost-push), bukan kelebihan permintaan, sehingga respons kebijakan tidak dapat semata-mata mengandalkan pengetatan permintaan (Blanchard, 2021).

4.2.2 Peran Kebijakan Fiskal-Moneter dalam Moderasi Siklus

Data empiris Indonesia 2020-2023 secara kuat mendukung proposisi teoretis bahwa koordinasi kebijakan fiskal-moneter (policy mix) yang koheren merupakan determinan kritis resiliensi makroekonomi. Program PEN 2020 (ekspansi fiskal) yang disinergikan dengan pelonggaran moneter agresif Bank Indonesia secara bersama-sama mencegah

kontraksi yang lebih dalam dan mempercepat pemulihan. Sebaliknya, ketika tekanan inflasi meningkat pada 2022, konsolidasi fiskal yang sudah dimulai sejak pertengahan 2021 dan pengetatan moneter yang agresif pada 2022-2023 bekerja secara sinergis untuk meredamnya tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan secara berlebihan (BI, 2024; Kemenkeu RI, 2024).

Pengalaman ini memvalidasi assignment principle Mundell: kebijakan moneter lebih efektif untuk menangani inflasi (stabilitas harga), sementara kebijakan fiskal lebih efektif untuk menangani output gap dan pengangguran. Namun dalam praktiknya, terutama dalam kondisi guncangan eksternal yang bersifat simultan, diperlukan respons terpadu yang melampaui pembagian peran sederhana tersebut (Obstfeld & Rogoff, 2020).

4.2.3 Keterbatasan Pengukuran dan Agenda Riset ke Depan

Kajian ini perlu mengakui beberapa keterbatasan metodologis yang inheren dalam pengukuran ekonomi makro konvensional. Pertama, PDB sebagai ukuran kesejahteraan mengabaikan dimensi distribusi, keberlanjutan lingkungan, dan produksi non-pasar. Inisiatif pengembangan indikator kesejahteraan yang lebih holistik, seperti Human Development Index (HDI) UNDP atau Beyond GDP framework OECD, sedang dalam proses pengembangan dan mulai diadopsi secara lebih luas (Stiglitz et al., 2019). Kedua, pengangguran terbuka mengabaikan underemployment dan 'pengangguran terselubung' (disguised unemployment) yang masih sangat signifikan dalam struktur ekonomi informal Indonesia. Ketiga, siklus ekonomi yang diidentifikasi dari data historikal tidak serta-merta memberikan prediksi yang akurat untuk siklus mendatang, mengingat sifat non-stasioner struktur ekonomi.

Agenda riset yang perlu dikembangkan ke depan mencakup: (1) pengembangan model DSGE yang dikalibrasi khusus untuk ekonomi Indonesia guna meningkatkan akurasi analisis siklus; (2) kajian empiris komprehensif tentang hubungan Phillips yang non-linear di Indonesia pasca-pandemi; (3) pengembangan indikator kesejahteraan komposit yang mengintegrasikan dimensi PDB, pemerataan, dan keberlanjutan; serta (4) analisis transmisi kebijakan moneter yang mempertimbangkan struktur sektor keuangan Indonesia yang unik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Artikel ini telah menyajikan kajian komprehensif atas empat pilar pengukuran ekonomi makro, PDB, inflasi, pengangguran, dan siklus ekonomi, dalam konteks Indonesia periode 2019-2023. Beberapa simpulan pokok dapat ditarik sebagai berikut.

1. Indonesia telah menunjukkan resiliensi makroekonomi yang tinggi pasca-resepsi pandemi 2020, dengan pemulihan PDB riil yang relatif cepat dan solid ke level 5,05% pada 2023, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi global.
2. Efektivitas kerangka inflation targeting Bank Indonesia terkonfirmasi secara empiris: inflasi berhasil diredam dari 5,51% (2022) menjadi 2,61% (2023) melalui pengetatan moneter yang terukur, tanpa mengakibatkan 'hard landing' pada pertumbuhan ekonomi.
3. Pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan pemulihan yang gradual namun konsisten, dengan TPT yang mendekati kembali level pra-pandemi. Namun, kualitas pemulihan perlu dicermati mengingat tingginya proporsi penyerapan di sektor informal yang rentan.
4. Koordinasi kebijakan fiskal-moneter terbukti menjadi faktor determinan dalam memoderasi siklus ekonomi Indonesia. Policy mix yang koheren merupakan instrumen yang tidak tergantikan dalam menghadapi guncangan eksternal berskala besar.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, artikel ini merekomendasikan beberapa agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian.

1. Pemerintah perlu mendorong peningkatan rasio investasi mendekati 35% PDB untuk mendukung target pertumbuhan jangka panjang 7-8% yang dibutuhkan visi Indonesia Emas 2045, melalui percepatan reformasi iklim investasi dan peningkatan investasi publik yang berkualitas.
2. Bank Indonesia perlu mempertahankan komitmen pada kerangka inflation targeting yang kredibel sebagai jangkar ekspektasi, sembari mengembangkan instrumen

makroprudensial yang semakin presisi dalam merespons berbagai jenis guncangan inflasi.

3. Kebijakan ketenagakerjaan perlu melampaui sekadar penurunan TPT, dengan fokus yang lebih kuat pada peningkatan kualitas pekerjaan, formalisasi sektor informal, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap transformasi digital.
4. BPS dan lembaga terkait perlu mengembangkan sistem indikator ekonomi yang lebih komprehensif melampaui PDB dan IHK, dengan mengintegrasikan dimensi pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan modal manusia sebagai bagian dari kerangka pengukuran kesejahteraan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizenman, J., Edwards, S., & Riera-Crichton, D. (2020). Adjustment patterns to commodity terms of trade shocks: The role of exchange rate and international reserves policies. *Journal of International Money and Finance*, 100, 102097.
- Alamsyah, H., Adamanti, J., Darsono, D., & Wuryandani, D. (2022). The role of monetary policy and the importance of inflation expectations: Lessons from Indonesia. *Bank Indonesia Working Paper No. 3/2022*.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2024). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2024). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2023*. BPS RI.
- Bank Indonesia [BI]. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia [BI]. (2024). *Tinjauan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023*. Bank Indonesia.
- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045: Indonesia Emas*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Blanchard, O. (2021). In defense of concerns over the \$1.9 trillion relief plan. *Peterson Institute for International Economics Policy Brief 21-1*.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2022). *Macroeconomics (8th ed.)*. Pearson Education.

- Boediono. (2016). *Ekonomi makro (Edisi revisi)*. BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Bureau of Economic Analysis [BEA]. (2024). *GDP and the National Income and Product Account (NIPA) Handbook*. U.S. Department of Commerce.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). *Principles of economics (13th ed.)*. Pearson Education.
- Coyle, D. (2014). *GDP: A brief but affectionate history*. Princeton University Press.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). *Macroeconomics (13th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *American Economic Review*, 58(1), 1-17.
- International Labour Organization [ILO]. (2023). *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*. ILO.
- International Monetary Fund [IMF]. (2024). *World Economic Outlook: Steady but slow-Resilience amid divergence*. IMF.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2024*. Kemenkeu RI.
- Krugman, P., & Wells, R. (2021). *Macroeconomics (6th ed.)*. Worth Publishers.
- Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6), 1345-1370.
- Mankiw, N. G. (2022). *Macroeconomics (11th ed.)*. Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2023). *Principles of macroeconomics (10th ed.)*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G., & Reis, R. (2018). Friedman's presidential address in the evolution of macroeconomic thought. *Journal of Economic Perspectives*, 32(1), 81-100.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets (12th ed.)*. Pearson Education.
- NBER Business Cycle Dating Committee. (2023). *Business cycle dating*. National Bureau of Economic Research.
- Nopirin. (2020). *Pengantar ilmu ekonomi makro dan mikro (Edisi keempat)*. BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2020). Revisiting speculative hyperinflations in monetary models. *Review of Economic Dynamics*, 36, 22-40.
- OECD. (2024). *OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 1*. OECD Publishing.

- Phelps, E. S. (1968). Money-wage dynamics and labor-market equilibrium. *Journal of Political Economy*, 76(4, Part 2), 678-711.
- Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957. *Economica*, 25(100), 283-299.
- Prasetyo, P. E. (2022). *Fundamental makroekonomi (Edisi ketiga)*. Beta Offset.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics (20th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Snowdon, B., & Vane, H. R. (2019). *Modern macroeconomics: Its origins, development and current state (2nd ed.)*. Edward Elgar Publishing.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Stiglitz, J. E., Fitoussi, J.-P., & Durand, M. (2019). Measuring what matters: GDP and beyond. *Business Economics*, 54(4), 238-242.
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi ketiga)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development (13th ed.)*. Pearson Education.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222.
- United Nations. (2009). *System of National Accounts 2008*. UN/EC/IMF/OECD/World Bank.
- World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects: Fiscal policy for growth*. The World Bank Group.
- World Bank. (2024). *World Development Indicators 2024*. The World Bank Group.